

## **Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan Dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura)**

**Christina Irwati Tanan<sup>1\*</sup>, Jimmi Ari Duri<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan : Fakultas Ekonomi , Universitas Ottow Geissler Papua, Jayapura, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi : Fakultas Ekonomi , Universitas Ottow Geissler Papua, Jayapura, Indonesia

\*e-mail: [christinatanano6@gmail.com](mailto:christinatanano6@gmail.com)

*Available online :*

9 September 2018

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Jayapura pada tahun 2011 s/d 2017 untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Jayapura yang dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Jayapura.

Berdasarkan hasil Analisis ratio keuangan diperoleh Kontribusi PAD terhadap Penerimaan daerah Kota Jayapura menunjukkan bahwa semakin tinggi kontribusi PAD rata-rata ratio derajat desentralisasi dari tahun 2011/d 2017 adalah sebesar 11,56 persen, namun masih dalam kategori rendah sekali. Rasio ketergantungan Pemerintah Kota Jayapura terhadap Pemerintah Pusat semakin menurun tetapi masih dalam kategori tinggi, karena masih dominannya pendapatan transfer pusat dalam pendapatan daerah. Rasio kemandirian daerah maka menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih rendah sekali dan perlu ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura untuk meningkatkan kemandiriannya terhadap penerimaan transfer pusat. Rasio Efektifitas menunjukkan realisasi PAD Kota Jayapura pada tahun 2011 s/d 2017 menunjukkan hasil sangat efektif karena pencapaian realisasi PAD diatas target yang ditetapkan. Rasio efisiensi pemerintah Kota Jayapura masuk dalam kriteria sangat Efisien karena perbandingan antara biaya pemungutan PAD dan realisasi penerimaan PAD tahun 2011 s/d 2017 rata-rata sebesar 3,21 persen atau < 5 persen yang masuk dalam kategori sangat Efisien. Kontribusi yang diperoleh dari penerimaan BUMD masih tergolong kecil terhadap Total Penerimaan daerah yaitu rata-rata sebesar 0,29 persen . Penelitian ini diharapkan Sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan bagi Pemerintah Kota Jayapura untuk terus meningkatkan kinerja keuangannya antara lain mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan meningkatkan kemandirian daerah terhadap pemerintah pusat.

**Kata kunci: Kinerja keuangan, evaluasi kinerja keuangan, analisis ratio.**

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the financial performance of the Jayapura City Government in 2011 to 2017 to evaluate the financial performance of the Jayapura City Government which can be an evaluation to improve the financial performance of the Jayapura City Government.

Based on the results of the financial ratio analysis, the PAD contribution to revenue in the Jayapura City area shows that the higher the PAD contribution the average decentralized degree ratio from 2011/2017 is 11.56 percent, but still in the very low category. The Jayapura City Government's dependency ratio towards the Central Government has declined but is still in the high category, due to the still dominant

*dominance of central transfer revenues in regional revenues. The regional independence ratio indicates that the independence ratio is still very low and there needs to be an effort made by the Jayapura City Government to increase its independence towards central transfer receipts. The Effectiveness Ratio shows that the realization of PAD Kota Jayapura in 2011 to 2017 shows very effective results because the achievement of PAD realization is above the target set. The efficiency ratio of the Jayapura City government is included in the criteria of being very efficient because the comparison between the cost of collecting PAD and the realization of revenue from PAD in 2011 to 2017 is an average of 3.21 percent or <5 percent in the very efficient category. Contributions obtained from revenue from BUMD are still small in terms of total regional revenue, which is an average of 0.29 percent.*

*This research is expected As an evaluation of financial performance for the Jayapura City Government to continue to improve its financial performance, among others, reducing dependence on central transfers and increasing regional independence towards the central government.*

**Keywords:** *Financial performance, financial performance evaluation, ratio analysis.*

## 1. Pendahuluan

Peran pemerintah daerah diperlukan dalam meningkatkan dan mengembangkan daerahnya menuju kearah yang lebih baik. Peran pemerintah dapat dilihat seperti dalam penyediaan barang publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang ada di daerah. Untuk menunjang peran pemerintah sangat ditunjang dalam perolehan pendapatan daerah, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk berperan bukan hanya dari penggunaan anggaran tersebut tetapi perlu meningkatkan sisi penerimaannya. Hal ini tentu saja seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan kualitas penyediaan barang publik dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Demikian juga dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam mewujudkan peranannya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait dengan kinerja dari pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara baik. Seperti yang dikemukakan oleh (Bastian, 2010), kinerja dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi. Untuk itu Pemerintah perlu melihat sejauhmana kegiatan dan programnya apakah sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran, misi dan visinya (Pramono, 2014). pada Pemerintah Kota Surakarta hasil analisis data menyebutkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta yang masih kurang di aspek kemandirian dan aspek keserasian, analisa rasio selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian, efisiensi, efektivitas, keserasian dan pertumbuhan . Dalam penelitian ini menggunakan data dua tahun untuk menggambarkan kinerja keuangan daerah, penelitian ini terfokus pada pengukuran analisis ratio yaitu kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemampuan mengembalikan pinjaman (DSCR). Hasil dari analisa ratio dalam penelitian ini untuk pengukuran kinerja keuangan sedangkan analisa rasio untuk pengukuran kinerja keuangan juga dapat digunakan untuk evaluasi kinerja keuangan. Hal inilah yang akan menjadi penelitian lebih lanjut.

Agar Laporan keuangan lebih bermakna dan bermanfaat untuk pertimbangan pembuatan keputusan serta untuk pengukuran dan evaluasi kinerja maka laporan keuangan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut (Mahmudi, 2016). Laporan keuangan yang dianalisis dapat digunakan pada pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dibutuhkan pada kinerja keuangan pemerintah yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Jayapura yang akan digunakan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Jayapura.

## **2. Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis Kinerja Keuangan Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2009) Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksud untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor public dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor public digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor public dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

### **Laporan Keuangan**

Menurut Mahmudi (2016), Salah satu tujuan dan manfaat laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan sebagai pertimbangan pembuatan keputusan serta untuk pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Laporan keuangan yang dipublikasikan bersifat untuk umum (*general purposive financial statements*) bukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik kalangan tertentu saja. Oleh karena itu, agar Laporan keuangan lebih bermakna dan bermanfaat untuk pertimbangan pembuatan keputusan serta untuk pengukuran dan evaluasi kinerja maka laporan keuangan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan informasi dalam laporan keuangan Neraca, LRA, LO, LPE, Laporan Perubahan SAL, LAK, dan CaLK dapat dilakukan serangkaian analisis laporan keuangan.

### **Analisa Rasio Keuangan**

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Terdapat berbagai macam analisis rasio keuangan, yaitu Selain rasio-rasio tersebut, masih terdapat beberapa rasio keuangan untuk mengukur kinerja, antara lain: Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio

Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisien PAD, Rasio Efektivitas Pajak, Rasio Efisien Pajak, Derajat Kontribusi BUMD, Analisa Regresi, Trend, dan Prediksi.

Analisis ratio merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah. Antara lain: Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Efektivitas Pajak, Rasio Efisiensi Pajak, Derajat Kontribusi BUMD (Mahmudi, 2016).

### 3. Metode

#### Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Jayapura Kantor BPKAD Kota Jayapura dan Kantor BAPENDA Kota Jayapura.

Data penelitian ini menggunakan data sekunder, data diperoleh melalui Kantor BPKAD Kota Jayapura yaitu data Laporan keuangan Kota Jayapura (APBD, LRA) dari Tahun 2011 s/d Tahun 2017. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh orang lain bukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian (Ghozali Imam 2016).

#### Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis data kuantitatif yaitu dengan analisis ratio keuangan.

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \quad (1)$$

Sumber : (Mahmudi, 2016)

Rasio Ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \quad (2)$$

Sumber : (Mahmudi, 2016)

Rasio Kemandirian Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah(PAD)}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi}) + \text{Pinjaman}} \times 100\% \quad (3)$$

Sumber : (Mahmudi, 2016)

Berdasarkan rasio kemandirian diatas maka dapat diketahui tingkat kemampuan daerah sebagai berikut dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1. Tingkat Kemampuan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber: (Halim, 2004)

Rasio Efektivitas Pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan}} \times 100\% \quad (4)$$

Sumber : (Mahmudi, 2016)

Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efektif : >100%
- Efektif : 100%
- Cukup efektif : 90%-99%
- Kurang efektif : 75%-89%
- Tidak efektif : < 75%

Rasio Efisiensi Pendapatan dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatn dengan realisasi penerimaan pendapatan. Rasio efisiensi pendapatan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\% \quad (5)$$

Sumber : (Mahmudi, 2016)

Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Secara umum, nilai rasio efisiensi pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Sangat efektif	:<5%
Efisiensi	: 5%-10%
Cukup efisien	:11%-20%
Kurang efisien	:21% -30%
Tidak efisien	:>30%

Derajat kontribusi Laba Perusahaan Pemerintah merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan pemerintah dalam mendukung pendapatan negara. Rasio ini dihitung dengan cara membanding penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan pemerintah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan.(Mahmudi 2016)

$$\text{Derajat Kontribusi BUMN/BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMN/BUMD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \quad (6)$$

Sumber : (Mahmudi, 2016)

Hasil penelitian terkait analisis kinerja keuangan adalah sebagai berikut: (Difinubun 2016) Kinerja keuangan Kabupaten dan Kota pemekaran provinsi Maluku tahun 2010-2013 ditinjau dari rasio dan indeks keuangan yaitu sangat rendah dengan Pola hubung instruktif. dikemukakan hasil analisis data menyebutkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian sedangkan tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta sudah sangat efisien dan efektif, pertumbuhan PAD cukup tinggi dan kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi (Pramono, 2014).

Saputra (2016) bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2014.

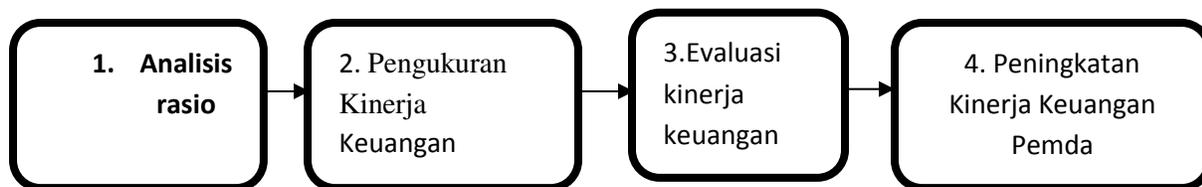
Rahmayati (2016) kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal dan disarankan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebaiknya meningkatkan Pendapatan asli daerah dan meningkatkan belanja modal.

Welio (2016) Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nabire mengalami penurunan dan kenaikan. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nabire 1 (satu) sampai dengan 6% selama tahun anggaran 2011-2013 dan disarankan Pemerintah Kabupaten Nabire harus terus meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian diatas maka dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dan belanja modal. Sehingga untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan belanja modal.

## Diagram Alir Penelitian

Kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar. 1. Diagram Alir Penelitian**

Laporan keuangan pemerintah dilakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis ratio untuk pengukuran kinerja keuangan dan evaluasi kinerja keuangan dilakukan sehingga dapat diperoleh perbaikan kinerja keuangan berupa peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

## 4. Hasil dan Pembahasan

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kota Jayapura dengan analisis rasio keuangan sebagai berikut:

### 1. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1. Derajat Desentralisasi Kota Jayapura**

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	TOTAL PENDAPATAN	RATIO
2011	63.491.881.560.00	717.837.367,326.00	8,84
2012	78.138.312.941.00	846,989,054,526.00	9,22
2013	103.430.111.932.00	1,005,472,266,416.00	10,29
2014	147.103.021.595,00	1,141,134,283,111.00	12,89
2015	152,631,134,983.34	1,220,320,338,595.34	12,51
2016	164,831,615,677.74	1,278,729,340,456.74	12,89
2017	176,666,250,172.78	1,239,051,683,381.78	14,26

Sumber: Data diolah, (2018)

Berdasarkan tabel diatas maka kontribusi PAD terhadap Penerimaan daerah Kota Jayapura semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah Kota Jayapura dalam penyelenggaraan desentralisasi. Kontribusi PAD pada tahun 2011 adalah sebesar 8.84 persen dan meningkat menjadi 9.22 persen pada tahun 2012 dan kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah terus meningkat dan tertinggi di tahun 2014 sebesar 12.89 persen kemudian di tahun 2015 menurun menjadi 12.51 persen, di tahun 2016 meningkat menjadi

12.89 persen dan pada tahun 2017 naik menjadi 14.26 persen. Sehingga rata-rata ratio derajat desentralisasi dari tahun 2011-2017 adalah sebesar 11.56 persen. Kondisi ini karena adanya kenaikan PAD di Kota Jayapura. Namun bila dihubungkan dengan kemampuan keuangan daerah masih masuk dalam kategori rendah sekali.

2. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio Ketergantungan keuangan daerah ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.2. Rasio Ketergantungan daerah**

TAHUN	PENDAPATAN TRANSFER	TOTAL PENDAPATAN	RASIO	KATEGORI
2011	571,217,378,466.00	717,837,367,326.00	79,57	Tinggi
2012	700,372,434,085.00	846,989,054,526.00	82,69	Tinggi
2013	804,083,016,484.00	1,005,472,266,416.00	79,97	Tinggi
2014	901,862,316,516.00	1,141,134,283,111.00	79,03	Tinggi
2015	944,779,914,612.00	1,220,320,338,595.34	77,42	Tinggi
2016	1,113,882,688,957.00	1,278,729,340,456.74	87,11	Tinggi
2017	1,046,127.433,209.00	1,239,051,683,381.78	84,43	Tinggi

Sumber: Data diolah, 2018

Rasio ketergantungan Pemerintah Kota Jayapura menunjukkan bahwa pada tahun 2011 rasio ketergantungan daerah sebesar 79.57 persen dan meningkat menjadi 82.69 persen ditahun 2012 dan di tahun 2013 mengalami penurunan dan ditahun 2015 rasio ketergantungan daerah turun menjadi 77.42 persen dengan demikian terjadi penurunan rasio ketergantungan mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 87.11 persen dan pada tahun 2017 menurun menjadi 84.43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Jayapura terhadap Pemerintah Pusat semakin menurun tetapi masih dalam kategori tinggi karena masih dominannya pendapatan transfer pusat dalam pendapatan daerah .

3. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah Kota Jayapura ditunjukka dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.3. Rasio Kemandirian Daerah**

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENDAPAN TRANSFER	RASIO	KATEGORI
2011	63,491,881,560.00	571,217,378,466.00	11,11	Rendah Sekali
2012	78,138,312,941.00	700,372,434,085.00	11,16	Rendah Sekali
2013	103,430,111,932.00	804,083,016,484.00	12,86	Rendah Sekali
2014	147,103,021,595.00	901,862,316,516.00	16,31	Rendah Sekali
2015	152,631,134,983.34	944,779,914,612.00	16,15	Rendah Sekali
2016	164,831,615,677.74	1,113,882,688,957.00	14,80	Rendah sekali
2017	176,666,250,172.78	1,046,127,433,209.00	16,89	Rendah sekali

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel rasio kemandirian daerah diatas maka dari tahun 2011 adalah sebesar 11,11 persen sampai dan terus meningkat sampai dengan tahun 2014 dan ditahun

2015 mengalami penurunan menjadi 16,15 persen dan menurun lagi menjadi 14,80 persen dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 16,89 persen. Kenaikan dan penurunan rasio menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih rendah sekali dan perlu ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura untuk meningkatkan kemandiriannya terhadap penerimaan transfer pusat.

#### 4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas pendapatan diperoleh dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan.

**Tabel 5.4. Rasio Efektifitas PAD**

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	RATIO
2011	59.240.000.000,00	63.491.881.560,00	4.251.881.560,00	107,18
2012	66.627.000.000,00	78,138,312,941.00	11.511.312.941,00	117,28
2013	90.000.000.000.00	103,430,111,932.00	13.430.111.932,00	114,92
2014	115,000,000,000.00	147,103,021,595.00	32,103,021,595.00	127,92
2015	141,689,244,391.00	152,631,134,983.34	10,941,890,592.34	107,72
2016	158,000,000,000.00	164,831,615,677.74	6,831,615,677.74	104,32
2017	170,247,695,314,00	176,666,250,172.78	6,418,554,858.78	103,77

Sumber: BPKAD Kota Jayapura

Berdasarkan hasil Rasio Efektifitas diatas menunjukkan bahwa realisasi PAD Kota Jayapura pada tahun 2011 s/d 2017 menunjukkan hasil sangat efektif karena pencapaian realisasi PAD diatas target yang ditetapkan. Seperti Realisasi PAD pada tahun 2011 sebesar Rp.63.491.881.560,00 yang nilainya diatas dari Rp. 59.240.000,00 dan perkembangan realisasi PAD terus meningkat dibanding target sampai dengan tahun 2017. Rata-rata efektivitas adalah 112 persen masuk dalam kategori sangat efektif: 100>persen.

#### 5. Rasio Efisiensi PAD

Rasio PAD Kota Jayapura ditunjukkan sebagai berikut

**Tabel 5.5 Rasio Efisiensi**

TAHUN	BIAYA PEROLEHAN PAD	REALISASI PAD	RASIO EFISIENSI	KATEGORI
2011	2,000,000,000.00	63,491,881,560.00	3,15	Efisien
2012	2,100,000,000.00	78,138,312,941.00	2,69	Efisien
2013	4,575,000,000.00	103,430,111,932.00	4,42	Efisien
2014	4,575,000,000.00	147,103,021,595.00	3,11	Efisien
2015	4,994,270,398.00	152,631,134,983.34	3,27	Efisien
2016	4,994,270,398.00	164,831,615,677.74	3,03	Efisien
2017	4,978,981,000.00	176,666,250,172.78	2,82	Efisien

Sumber: Data diolah, (2018)

Berdasarkan rasio efisiensi diatas maka pemerintah Kota Jayapura masuk dalam kriteria Efisien karena perbandingan antara biaya pemungutan PAD dan realisasi penerimaan

PAD nilainya berkisar < 5 persen . Rata-rata rasio efisiensi tahun 2011 s/d 2017 adalah sebesar 3,21 persen yang masuk dalam kategori sangat Efisien. Ini menunjukkan bahwa hasil pemungutan PAD dari tahun 2011 s/d 2017 lebih besar bila dibandingkan dengan biaya untuk memperoleh PAD.

#### 6. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini dihitung dengan cara membanding penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan pemerintah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan.(Mahmudi, 2016).

**Tabel 6. Derajat Kontribusi BUMD**

TAHUN	PENERIMAAN LABA BUMN/BUMD	TOTAL PENDAPATAN	Derajat Kontribusi BUMN/BUMD
2011	1,599,224,334.00	717,837,367,326.00	0,22
2012	2,085,078,817.00	846,989,054,526.00	0,25
2013	3,715,521,584.00	1,005,472,266,416.00	0,37
2014	4,825,279,014.00	1,141,134,283,111.00	0,42
2015	1,949,844,391.00	1,220,320,338,595.34	0,16
2016	8,019,527,537.00	1,278,729,340,456.74	0,63
2017	100,000,000.00	1,239,051,683,381.78	0,01

Sumber: Data diolah, (2018)

Bila dilihat pada tabel diatas kontribusi yang diperoleh dari penerimaan BUMD masih tergolong kecil terhadap Total Penerimaan daerah. Pada tahun 2011 penerimaan laba BUMD sebesar Rp.1.599.224.334,00 dan terus meningkat hingga tahun 2014 dan pada Tahun 2015 menurun menjadi Rp.1.949.844.391,00 dan terus menurun dan pada tahun 2017 yang paling rendah menjadi Rp.100.000.000,00. Bila dilihat rata-rata derajat kontribusi penerimaan BUMMN/BUMD terhadap total pendapatan adalah sebesar 0,29 persen.

#### 5. Simpulan

Kontribusi PAD terhadap Penerimaan daerah Kota Jayapura menunjukkan bahwa semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah Kota Jayapura .Rata-rata ratio derajat desentralisasi dari tahun 2011 s/d 2017 adalah sebesar 11,56 persen. Namun bila dihubungkan dengan kemampuan keuangan daerah masih masuk dalam kategori rendah sekali.

Hasil menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Jayapura terhadap Pemerintah Pusat semakin menurun tetapi masih dalam kategori tinggi karena masih dominannya pendapatan transfer pusat dalam pendapatan daerah .

Rasio kemandirian daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih rendah sekali dan perlu ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura untuk meningkatkan kemandiriannya terhadap penerimaan transfer pusat.

Berdasarkan hasil Rasio Efektifitas diatas menunjukkan bahwa realisasi PAD Kota Jayapura pada tahun 2011 s/d 2017 menunjukkan hasil sangat efektif karena pencapaian realisasi PAD diatas target yang ditetapkan.

Berdasarkan rasio efisiensi diatas maka pemerintah Kota Jayapura masuk dalam kriteria sangat Efisien karena perbandingan antara biaya pemungutan PAD dan realisasi penerimaan PAD nilainya berkisar <5 persen yaitu rata-rata rasio efisiensi tahun 2011 s/d 2017 sebesar 3,21 persen yang masuk dalam kategori sangat Efisien.

Bila dilihat pada tabel diatas kontribusi yang diperoleh dari penerimaan BUMD masih tergolong kecil terhadap Total Penerimaan daerah. Bila dilihat rata-rata derajat kontribusi penerimaan BUMMN/BUMD terhadap total pendapatan adalah sebesar 0,29 persen.

## 6. Saran dan Keterbatasan Penelitian

Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan menggunakan analisis keuangan lain yang dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah bukan hanya dari sisi penerimaan saja tetapi dari sisi pengeluaran seperti belanja, sehingga semakin dapat menjadi tolak ukur terhadap pengukuran kinerja keuangan dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah .

### Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi keti. jakarta: penerbit Erlangga.
- Difinubun, Yusron. 2016. “Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Di Tinjau Dari Rasi Dan Indeks Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Provinsi Maluku).” *Online-ABIS Maksi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UGM* 15.
- Ghozali Imam. 2016. *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Semarang: Yoga Pratama.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Refi. yogyakarta: UPP AMD YKPN.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. yogyakarta: Andi.
- Pramono, Joko. 2014. “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Among Makarti*.
- Rahmayati, Anim. 2016. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013.” *Jurnal EKA CIDA*.
- saputra, sandy. 2016. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana.” *E-Journal Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen* 4.
- Welio, Wonda. 2016. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Propinsi Papua.” *Jurnal EMBA* 4: 192–200.